

Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

The Role Of Village Heads In Empowering Farmer Communities In Kota Bangun Ilir Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency

Muhammad Miftah Farid¹

¹Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 10, No. 02

Page: 66-76

Published: 2022

KEYWORDS

Role, Village Head, Farmer
Empowerment

CORRESPONDENCE

E-mail: cerdikfarid@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to identify and analyze the role of the village head in empowering farmers in Kota Bangun Ilir Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency and to identify the inhibiting factors. This type of research uses qualitative research and data collection by means of interviews, observation and documentation, while the informant technique uses a purposive sampling technique as resource persons, namely the Head of Service, staff, community or visitors. The data analysis used is an interactive model developed by Milles and Huberman. The results showed that the role of the Village Head of Kota Bangun Ilir had been carried out well, which was identified from the awareness stage, the socialization carried out by the Village Head such as training on giving vitamins to farmers' plants was effective. The community transformation stage is given an understanding through the Village Head program to broaden horizons and provide basic skills regarding rice farming so that they can take a role in society through rice farming. Through the improvement stage, the village head has provided appropriate programs such as honing community skills and skills through outreach so that innovative initiatives and capabilities are formed to deliver independence. The inhibiting factors for the village head's role in empowering farmers are the lack of community participation and budget constraints.

INTRODUCTION

Pemerintah dengan semua instrumennya adalah pilar utama implementasi negara. Meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan negara, itu juga akan meningkatkan pengembangan negara dan akhirnya mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dalam bentuk perkembangan yang berkembang di semua bidang masyarakat.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi paling bawah, tetapi berada paling depan dan langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa segala bentuk program

pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara pada desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kebebasan untuk mengelola pemerintahannya dengan memberikan bantuan keuangan melalui program dana desa, dana desa ini dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat melalui desa. Pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat yang ada di daerah, jadi kinerja kepala desa di kepala pemerintah desa harus mampu melaksanakan tugas utama mengarahkan dan mengoordinasikan pemerintah desa. Dengan

melaksanakan bisnis rumah tangga desa, mengembangkan pengembangan dan pengembangan masyarakat dan mempromosikan perekonomian. Kota. Namun pada kenyataannya, ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam pasokan layanan yang lambat dan rumit dan merupakan formalitas. Atas dasar deskripsi di atas, pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang menarik di mana berbagai program pengurangan kemiskinan, khususnya di bidang pertanian yang belum mampu mengatasi masalah yang ada.

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki wilayah daratan yang luas, oleh karena itu Kalimantan Timur memiliki banyak potensi sumber daya pertanian, salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah

Siapa yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, mata pencaharian masyarakat utamanya adalah petani. . Berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian masih dilakukan oleh pemerintah, seperti pembentukan kelompok-kelompok petani, menawarkan modal komersial, bantuan benih pertanian, saran pertanian, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bahwa banyak bantuan yang diberikan tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah desa (repositori.uin-alauddin.ac.id).

Termasuk di Kecamatan Kota Bangun khususnya Desa Kota Bangun Ilir yang terjadi pada masyarakat Desa Kota Bangun Ilir adalah pemerintah desa dan PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan) masih kurang dalam peran dalam memberdayakan masyarakat desanya melalui suatu program pemberdayaan yang secara mandiri dianggarkan anggaran pendapatan dan belanja desa, sampai sejauh ini pemerintah desa hanya melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara nasional seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, beras raskin, program keluarga

harapan, bantuan langsung tunai, dan lain-lain sebagainya (Hasil observasi, 30 Maret 2018).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ilir dan tidak berjalan dengan baik terbukti banyaknya bantuan dari pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan dengan baik dan benar, hal ini dapat diketahui banyaknya masyarakat yang masih mempertanyakan mengenai bantuan yang telah diterima pemerintah desa yang belum dilaksanakan seperti bantuan alat tani seperti cangkul dan gerobak sorong. Dalam hal ini banyak ditemui masyarakat yang belum mampu mengembangkan peningkatan mata pencahariannya sehingga berimbas kepada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu lemahnya tingkat pemberdayaan masyarakat yang dikeluhkan masyarakat dan belum adanya sarana pendukung pertanian seperti mesin giling masyarakat yang masih kurang dan rusak sehingga hasil padi masyarakat harus membayar upah kepada tukang giling sehingga upah untuk menggiling mengurangi hasil pendapatan pertanian masyarakat yang tidak memiliki mesin giling sendiri. (kabupaten.kutaikartanegara.com).

Banyak dari masyarakat yang mengatakan bahwa belum adanya program-program yang mendukung kegiatan masyarakat yang bertani misalnya sosialisasi dari PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan) tentang bagaimana penanaman padi yang efektif, cara mendapatkan panen yang banyak, cara mengatasi hama, cara memupuk padi dan bantuan alat bertani dan sarana pendukung lainnya. Peran Kepala Desa Kota Bangun Ilir Seharusnya dapat melaksanakan tugasnya melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya dibidang pertanian masyarakat, selain Kepala Desa Kota Bangun Ilir dapat melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat petani terkait harga padi diantara petani dan pembeli hasil tani

masyarakat. Dan diharapkan adanya pendampingan dari Kepala Desa Kota Bangun Ilir dalam kegiatan masyarakat petani sehingga masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya Kepala Desa Kota Bangun Ilir masyarakat dapat sejahtera.

Itulah menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau melihat Peran kepala desa dalam pemberdayaan petani di desa Kota Bangun Ilir, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanagara. Hal ini dimaksudkan kedepannya sangat membantu kegiatan pemerintah desa dan masyarakat petani.

THEORETICAL FRAMEWORK

Peran

Soekanto (2013:212) Peran (peran) adalah posisi dinamis posisi (status). Jika ada yang mengarahkan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia mengarahkan peran. Perbedaan antara posisi dan perannya adalah untuk sains. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Linton (dalam Soekanto, 2013: 213) tidak ada peran tanpa posisi atau posisi tanpa peran.

Peran pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:84), peran pemerintah secara umum tampak dalam berbagai bentuk seperti fungsi peraturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijakan, fungsi layanan, fungsi dari fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Menurut Sumaryadi (2010:21), peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar yang melibatkan urusan agama dan kepercayaan diri dan mengendalikan ekonomi dan memastikan keselamatan kehidupan sosial. Sedangkan, menurut Sitanggang (2000:134), peran pemerintah adalah realisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma-norma

dan nilai-nilai fundamental dalam interaksi mereka dengan lingkungan.

Pada konsep yang dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perannya adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan cara ia harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan statusnya dan fungsinya terhadap orang lain.

Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 dari 2005 Pasal 14 dan 15 menyatakan bahwa kepala desa memiliki kesempatan untuk mengatur pemerintah, pengembangan dan sosial. Urusan Pemerintah yang dimaksud adalah peraturan kehidupan masyarakat sesuai dengan otoritas desa, untuk melakukan peraturan desa, membentuk lembaga-lembaga masyarakat, membangun gelandangan dan kerja sama antar desa. Urusan pengembangan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur fasilitas publik desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

Laporan tentang implementasi pemerintah desa kepada publik dapat dilapisi papan reklame atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat, radio komunitas atau media lainnya. Fitur desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 2005 adalah Sekretaris Desa yang bertanggung jawab untuk membantu orang yang bertanggung jawab atas desa untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Dengan melakukan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kepala desa. Sekretaris desa diinformasikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota atas nama Bupati / Walikota. Pejabat desa lain telah ditunjuk oleh desa-desa desa. Pengangkatan para pejabat desa yang disebutkan di atas ditentukan oleh keputusan kepala desa dan usia jalan lingkar desa setidaknya 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.

Tentang pejabat desa lainnya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga masyarakat dapat dilatih ditetapkan oleh peraturan desa berdasarkan undang-undang dan peraturan. Lembaga kemasyarakatan ini bertanggung jawab untuk membantu pemerintah desa dan menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dievaluasi dengan uang, serta uang atau properti yang dapat digunakan sebagai desa milik implementasi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, pengeluaran, dan manajemen keuangan desa.

Kepala desa adalah orang pertama yang melakukan tugas dan kewajiban yang berat, untuk mengatur dan menjadi orang terkemuka yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah, pengembangan dan masyarakat dalam urusan pemerintah desa, urusan pemerintah publik, termasuk pelatihan, perdamaian dan ketertiban, sesuai dengan pembinaan Dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan mempromosikan serta mempromosikan serta mengembangkan semangat kerja sama timbal balik sebagai artikulasi utama pelaksanaan pemerintah desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Mardikanto (2012:27), dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan komunitas yang lebih luas yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengendalikan lingkungan mereka, termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan mereka dan kegiatan mereka". Berdasarkan teori peneliti, mengatakan pemberdayaan kehidupan manusia diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup masyarakat menggunakan sumber daya lingkungannya.

Menurut Soeharto (2006:59), pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah

serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok-kelompok lemah di masyarakat, terutama orang yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang dicapai dengan perubahan sosial, yaitu mereka yang tidak berdaya, memiliki kekuatan atau memiliki pengetahuan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial, seperti kepercayaan diri. Mampu mengambil aspirasi, yang mampu mengambil aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan secara independen dalam realisasi hidup mereka. Definisi pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu atau kolektif (kelompok).

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata dasar "kekuatan" yang berarti kekuatan atau kapasitas. Dari pemahaman ini, pemberdayaan ditafsirkan sebagai suatu proses yang bertujuan memperoleh daya, kekuatan atau kapasitas, serta proses penguatan kekuatan, kekuatan, atau kemampuan mereka yang memiliki kekuatan penambang atau partai pertahanan (Sulssidyani, 2004:7).

Hal ini dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi dalam kelompok masing-masing, di mana orang-orang dalam kelompok studi untuk menggambarkan suatu situasi, mengekspresikan pendapat mereka dan emosi mereka atau dengan kata lain, mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, untuk menganalisis, menganalisis, kemudian menemukan sebuah solusi.

Menurut Sumodingningrat (2004:41), pemberdayaan tidak permanen, tetapi target samapi masyarakat dapat mandiri, kemudian dirilis untuk mandiri, meskipun dari kejauhan, itu dipertahankan. Cara tidak gagal. Dilihat oleh pendapat ini, itu berarti memberdayakan melalui periode proses pembelajaran untuk mencapai status independen. Tahapan

intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat adalah siklus perubahan yang berusaha mencapai level yang lebih tinggi (Adi, 2002:179).

Atas dasar beberapa definisi definisi, dapat disimpulkan bahwa dalam esensi pemberdayaan, adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan kekuatan, kekuatan atau kapasitas kepada individu dalam masyarakat. Lemah untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan kebutuhan dan potensi. Dan masalah yang ditemui secara bersamaan memilih solusi alternatif dengan mengoptimalkan sumber daya dan memiliki secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memungkinkan dan memberdayakan masyarakat, khususnya kemiskinan dan waktu sendiri, ketidaksetaraan dan impotensi. Kemiskinan dapat dilihat sebagai indikator untuk mencapai kebutuhan dasar yang tidak mencukupi / dapat dicapai. Kebutuhan penting ini termasuk makanan, pakaian, dewan direktur, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Sementara dasar-dasar pemberdayaan masyarakat mengembangkan masyarakat, terutama kelompok miskin, rendah dan terpinggirkan, menciptakan hubungan kerja sama antara lembaga-lembaga masyarakat dan pembangunan, bergerak dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan dan tanggung jawab. Keberlanjutan meningkat (dalam Sutrisno, 2005:17)

Menurut Adimihardja dan Harry (2001:15), konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hierarki inisiatif dan penciptaan masyarakat dengan strategi utama memberi kekuasaan kepada masyarakat (dari, dan untuk masyarakat) Dan metode yang digunakan dalam teknik pemberdayaan adalah sebagai berikut: Participatory Rural Appraisal (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk mendorong gerakan pemberdayaan, ada beberapa aspek dan tingkat yang diperlukan

untuk diperhitungkan, seperti: perumusan konsep, perumusan model, proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi hasil dari implementasi dan pengembangan pelestarian pemberdayaan pergerakan.

Petani

Pengertian petani dapat diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri atau sumber energi dan mengelola lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam cara tradisional dan peralatan modern (Saragih, 2000:11). Secara umum, pertanian adalah aktivitas manusia yang mencakup pertanian, ternak, perikanan dan kehutanan. Petani dari pengertian yang lebih luas mencakup semua kegiatan bisnis mengenai penggunaan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia.

Petani adalah orang-orang yang pekerjaannya pertanian di lahan pertanian. Memahami petani menurut Anwas (2002:34) menunjukkan bahwa petani adalah orang-orang yang mencari tanaman tanah pertanian mereka atau meningkatkan ternak untuk mendapatkan kehidupan mereka.

Penghasilan atau pendapatan dapat dilihat dari mata pencaharian yang dibuat oleh setiap rumah tangga. Untuk seorang petani, tanah adalah salah satu elemen produksi yang akan menentukan keberhasilan pertanian, serta sumber pendapatan petani. Selain hasil dari mereka yang tumbuh, petani juga mendapatkan penghasilan dengan bekerja di sektor non-pertanian, seperti pekerja, perdagangan, pengrajin dan pekerjaan lain sejalan dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Pendapatan petani dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh seseorang atau kelompok hasil pengobatan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimensi ekonomi menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia

(material) baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

METHOD

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data yang bermakna secara mendalam, yaitu data aktual di Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau (dilapangan). Sumber data yang digunakan adalah data primer, terutama dengan mengamati sengaja, sistematis terkait fenomena sosial dengan gejala psikologis, interview (wawancara) Kepala Desa, Kepala Dusun, Masyarakat Petani dan Ketua Kelompok Tani berjumlah 3 orang dan Ketua RT berjumlah 2 orang yaitu Ketua RT 07 dan Ketua RT 08, dan data sekunder yaitu dengan bukti, catatan, atau laporan catatan sejarah yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dikunjungi dan tidak ditemukan oleh Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman serta Johnny Saldana, 2014:14).

RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam bab ini, penulis menyajikan data lapangan melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumentasi, untuk mempelajari data, laporan, dan arsip yang terkait dengan penelitian. Untuk memfasilitasi penelitian dan presentasi, penulis akan memberikan gambaran tentang Desa Kota Bangun Ilir dan lokasi penelitian.

Sejarah Wilayah Kerja Kota Bangun Ilir

Kota Bangun di bawah pada masa pemerintahan Kerajaan Kutai Martapura tahun 350-1605 yang beribukota di Muara Kaman, Kota Bangun dikenal memiliki wilayah yang disebut Negeri Paha meliputi wilayah: Keham,

Kedang Dalam, Kedang Ipil, Lebak Mantan, Lebak Cilong.

Kota Bangun merupakan salah satu pemukiman tertua di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu juga terdapat kawasan Kutai (Kutai Lama). Ayah Gusti Barap, istri Panembahan di Darat (mangkubumi Sultan Inayatullah).

Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan mengenai desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan lahirnya otonomi daerah dan di era globalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerah, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui apa akan terjadi. yang mereka butuhkan dan pengembangannya akan lebih efektif dan efisien, dan orang secara alami akan memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab.

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian. Kota Bangun Ilir Desa, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: Peran pemerintah desa dalam membina.

Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan

menggunakan konsep kesadaran dan kehendak masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan di sektor pertanian merupakan kontribusi yang sangat besar di sektor pertanian. Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian. Di sisi lain, ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana segala kegiatan pembangunan, dan sebagainya.

Program yang dibuat oleh kepala desa sangat mendukung kegiatan masyarakat petani hal ini dapat dilihat dari ke tiga programnya yang memberikan motivasi atau pemahaman Kembali serta penyadaran melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan contohnya Sosialisasi Pemahaman Bertani kepada Kelompok Tani agar kelompok petani dapat mengingat Kembali dan mengetahui tahapan tahapan yang penting dalam bertani yang dapat meningkatkan hasil tani mereka sendiri.

Peran Kepala Desa Dalam Tahap Penyadaran

Pada tahap penyadaran kepala Desa Kota Bangun Ilir berperan motivator yaitu memberikan kegiatan atau program untuk masyarakat akan diberdayakan melalui pemberian kesadaran mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu memiliki kualitas yang baik dan dapat menunjang kelangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah kelompok masyarakat petani padi, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kesusahan mereka dan kekurangan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Program-program Kepala Desa Kota Bangun Ilir dalam tahap penyadaran ini yang boleh dilaksanakan di tahap ini adalah untuk menyediakan pengetahuan dan sosialisasi baik melalui narasumber dari luar maupun dari pihak pemerintah desa. Dengan demikian, target tersebut mencakup bahwa mereka harus berhak dan proses pemberdayaan dimulai dengan diri mereka sendiri. Peran kepala Desa Kota Bangun Ilir dalam pemberdayaan masyarakat pada tahap penyadaran masyarakat dilakukan secara berkala melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat yang melibatkan semua pihak yang terkait seperti Ketua RT, kepala dusun, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan juga Ketua Kelompok Tani.

Dalam tahap penyadaran pemerintah desa yaitu kepala desa telah mendengarkan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penghambat dan menurunnya hasil panen padi kurang di dengar pihak yang bersangkutan. Kemudian kepala desa juga telah memberikan solusi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, tidak hanya itu kepala kampung juga dalam tahap penyadaran membuat beberapa program yang dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat petani. Kepala desa sangat mendukung kegiatan masyarakat petani hal ini dapat dilihat dari ke empat programnya yang memberikan dorongan penyadaran melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan contohnya seperti peningkatan kapasitas kelompok tani ini dilakukan agar kelompok petani dapat siaga dan mengetahui tahapan-tahapan yang penting dalam bertani yang dapat meningkatkan hasil tani mereka sendiri.

Peran Kepala Desa Dalam Tahap Transformasi

Pada tahap transformasi ini Kepala Desa Kota Bangun Ilir berperan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengelola pertaniannya agar lebih baik lagi, pada tahap

transformasi ini maksud dari peran kepala Desa Kota Bangun Ilir yaitu penguatan wawasan atau pengetahuan masyarakat petani dalam melihat potensi atau hasil dari pertanian mereka sendiri agar dapat tercapainya kemandirian pada masyarakat petani tersebut. Pada hakekatnya pemberdayaan adalah penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki kekuatan, tetapi orang tidak menyadarinya, atau bahkan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kekuasaan harus digali, kemudian dikembangkan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa Kota Bangun Ilir merupakan upaya membangun kekuatan, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha mengembangkannya berdasarkan proses kemandirian masyarakat itu sendiri.

Program-program kepala desa dalam tahap transformasi sangat baik dapat dilihat dari ke empat programnya misalnya pengadaan studi banding kelompok tani ini dimaksud untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok tani untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mereka dalam bidang pertanian baik studi tentang penghasilan pertaniannya maupun tahapan-tahapan dalam bertani.

Program kepala desa dalam tahap transformasi sangat baik dapat dilihat dari ke empat programnya misalnya pengadaan studi banding kelompok tani ini dimaksud untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok tani untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mereka dalam bidang pertanian baik studi tentang penghasilan pertaniannya maupun tahapan-tahapan dalam bertani. Selain itu juga dapat dilihat dari program peningkatan ekonomi masyarakat ini tujuannya untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat petani itu sendiri melalui potensi dan sumber daya yang berlimpah diharapkan mampu menunjang penghasilan masyarakat itu sendiri.

Peran Kepala Desa Dalam Tahap Peningkatan

Program-program kepala desa dalam tahap peningkatan telah dilaksanakan hal ini sangat baik dan tepat sasaran yang manav tujuannya kelompok tani ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok tani untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mereka dalam bidang pertanian baik penguatan tentang penghasilan pertaniannya maupun tahapan-tahapan dalam bertani.

Teknologi dan informasi sangat penting di perusahaan pertanian dalam pengembangan. Akibatnya, ketersediaan teknologi dan informasi yang sesuai dapat digunakan secara optimal. Salah satu hal yang perlu dihafalkan sebelum melanjutkan pemberdayaan masyarakat, adalah kebutuhan akan ketegasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan, di tingkat nasional, regional dan lokal. Keteguhan kebijakan masyarakat ini akan menentukan sejauh mana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan akuntabilitas masyarakat sendiri untuk memobilisasi partisipasi masyarakat pertanian untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan.

Kepala Desa Kota Bangun Ilir memberikan penjelasan. Strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif harus dirancang berdasarkan kebutuhan mereka, terutama terkait dengan tingkat adopsi yang telah ditunjukkan oleh petani penerima manfaat.

Pemerintah desa telah melakukan pemberdayaan tahap penigkatan yaitu melalui pendampingan kegiatan masyarakat, tetapi masyarakat petani masih sangat minim dalam mengikuti kegiatan yang telah di lakasanakan pemerintah desa. Kepala desa dalam tahap peningkatan kepada masyrakat berperan sebagai pendamping yaitu penyedia tempat dalam pendampingan untuk meningkatkan masyarakat petani di Kota Bangun Ilir.

Masyarakat petani Kota Bangun Ilir sangat terlihat tujuan dari pemerintah desa sangat baik untuk mendampingi kegiatan masyarakat melalui pendampingan tetapi dari masyarakat petanimesih kurang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan hasil mereka sendiri, akan tetapi pemerintah desa yaitu kepala kampung melakukan upaya atau program-program yang dapat meningkatkan hasil masyarakat petani itu sendiri.

Program-program kepala desa dalam tahap peningkatan sangat baik dapat dilihat dari ke dua programnya misalnya peningkatan produk unggulan ini dimaksud untuk dapat meningkatkan penghasilan pertaniannya maupun tahapan-tahapan dalam membuat produk. Selain itu juga dapat dilihat dari program peningkatan ekonomi kreatif masyarakat ini tujuannya untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat petani itu sendiri.

Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Petani di Desa Kota Bangun Ilir, Kabupaten Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanagara

Pemberdayaan masyarakat petani Desa Kota Bangun Ilir memiliki hambatan yang mempengaruhi keberhasilan petani dalam mencapai tujuan kendala yang menyebabkan program pemberdayaan tidak bekerja dengan lancar dalam pelaksanaannya adalah kurangnya kelompok tani berpartisipasi dalam kegiatan yang telah diberikan kepala desa seperti masyarakat yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi seperti pelatihan tehnik menaman padi yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini masih terhambat karena hal tersebut. Akibatnya penghasilan dari pertanian menjadi minim.

Faktor Partisipasi Dari Masyarakat Yang Kurang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang peran Kepala Desa dalam

pemberdayaan dilihat dari faktor penghambat pemberdayaan, agar petani mampu bersaing dalam peningkatan Sumber Daya Manusia maka wawasan yang dimiliki juga harus ditingkatkan agar dalam persaingan mampu untuk memberikan perlawanan secara wawasan dengan masyarakat lainnya.

Faktor Keterbatasan Anggaran

Hambatan dalam pemberdayaan petani dijelaskan oleh kepala Desa Kota Bangun Ilir ini adalah kurangnya atau terbatasnya anggaran dana desa yang di dapat Desa Kota Bangun Ilir sehingga melaksanakan setiap kegiatan desa masih terbatas tidak terlepas dalam kegiatan pemberdayaan terbatasnya anggaran dana desa membuat kegiatan berjalan secara bertahap sehingga masyarakat belum semua menerima pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa.

Pemerintahan Desa masih kekurangan anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan petani namun sudah dilakukan secara bertahap, kemudian masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam peningkatan wawasan pertanian maupun cara pemasaran yang baik. Peran seorang pemimpin dalam mensukseskan suatu kegiatan sangat dibutuhkan, dengan peran yang baik maka kegiatan yang terlaksana akan berjalan dengan baik juga. Di Desa Peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Peran kepala Desa Kota Bangun Ilir dalam pemberdayaan petani telah meningkat sebagian terbukti melalui kebijakan-kebijakan kepala desa yang dapat membantu penghasilan masyarakat seperti hasil panen yang mulai meningkat dan mempuni adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sehingga para petani mulai mampu mengelola pertaniannya dengan baik. Kepala desa telah memberikan dampak serius kepada masyarakat terbukti melalui Narasumber yang didatangkan oleh kepala desa sosialisasi masyarakat berjalan lebih

aktif. Tidak bisa dihindarkan juga beberapa petani yang masih banyak belum bisa memahami sosialisasi yang di berikan pemerintah desa karena belum bisa baca tulis sehingga menghambat mereka.

Dalam mengatasi faktor penghambat dalam pemberdayaan petani di desa Kota Bangun Ilir, Kabupaten Kota Bangun Kepala Desa sudah berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan agar pemberdayaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, peningkatan pemberdayaan seharusnya dilakukan dengan mengajak langsung kepada masyarakat dan menerangkan tentang pentingnya pemberdayaan agar dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh petani.

Kendala dalam faktor anggaran, Kepala Desa dan Pemerintah Desa harus berupaya dalam penambahan anggaran dalam kegiatan Pemberdayaan Petani yang ada di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun karena dengan cukupnya anggaran yang dimiliki maka pelaksanaan dalam pemberdayaan petani bisa berjalan dengan baik, dan harapan yang ingin di wujudkan dengan pemberdayaan petani bisa terlaksana sehingga kesejahteraan petani yang ada di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun bisa terlaksanakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan peran para Kepala Desa dalam pemberdayaan petani di Desa Kota Bangun Ilir, Kabupaten Kota Bangun, Kutai Kartanegara telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut diidentifikasi dari:

1. Tahap penyadaran

Pada tahap penyadaran, Kepala Desa telah memberikan program melalui sosialisasi masyarakat petani yang telah dilaksanakan seperti pelatihan pemberian vitamin pada tanaman petani itu sendiri yang efektif, sehingga masyarakat akan semakin terbuka

dan merasa kebutuhan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi dalam bidang pertanian dari awal hingga tahap pengelolaan dan penjualan hasil pertanian masyarakat.

2. Tahap transformasi

Masyarakat diberikan pemahaman melalui program kepala desa untuk meningkatkan kemampuan dalam memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang diamati dengan benar untuk mencapai masalah pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan program kepala desa pada tahap ini masyarakat petani mendapatkan kecakapan keterampilan untuk membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar mengenai pertanian padi agar dapat mengambil peran di dalam masyarakat melalui pertanian padi.

3. Tahap peningkatan

Tahap peningkatan Kepala desa telah memberikan program yang tepat seperti mengasah kecakapan dan ketrampilan masyarakat melalui sosialisasi sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian. Peningkatan maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Faktor penghambat peran Kepala Desa dalam pemberdayaan petani di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat desa yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi seperti pelatihan teknik menanam padi yang kurang dan keterbatasan anggaran.

REFERENSI

- Adi, IR. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sisual*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. (2001). *PRA (Participatory Research Appraisal) dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat*, Bandung: Humainora Utama Press.

- Anwas, M. Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, (2012), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saragih, B. (2000). *Agribisnis Berbasis Peternakan: Kumpulan Pemikiran*. Bogor: IPB.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I Nyoman, (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodingningrat (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutrisno, Basuki. (2005). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana.